

# **BELENGGU KELANGKAAN LINGKUNGAN DAN REPRODUKSI KONFLIK DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAH LIMBAH B3 OLEH PT. DESI DI KECAMATAN BRONDONG LAMONGAN**

Tri Susilo Agung Wicaksono \*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik dalam rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teori *Environmental Scarcity* dari Thomas Homer-Dixon. Sumber daya alam memiliki kapasitas yang terbatas sedangkan manusia memiliki kehendak atas sumber daya yang tidak terbatas. Konsumsi sumber daya alam yang berlebihan oleh manusia menyebabkan meningkatnya kelangkaan sumber daya alam dan berimplikasi terhadap lahirnya konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode pengumpulan data *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tlogoretno, Brengkok dan Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan telah mengalami kelangkaan sumber daya air secara alamiah sejak lama. Kelangkaan tersebut tidak lantas menyebabkan konflik kekerasan dikarenakan dua hal. Pertama, jumlah populasi penduduk terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kedua, adanya faktor nilai-nilai religiusitas yang mengakar pada masyarakat pantura menjadikan kelangkaan air sebagai sebuah fenomena kodrati (*given*). Hadirnya rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 oleh PT. Dowa Ecosystem Indonesia di Desa Tlogoretno dianggap sebagai pendatang yang dapat mencemari lingkungan dan memperparah kondisi kelangkaan selama ini. Adanya kegagalan membangun komunikasi yang baik antar pihak menyebabkan kecemburuan sosial yang memantik terjadinya keresahan dimasyarakat. Akibatnya, konflik dan perlawanan masyarakat menjadi konsekuensi logis yang mengiringi rencana pembangunan pabrik. Upaya penyelesaian konflik mengalami kegagalan. Masyarakat kontra pabrik mengancam akan melakukan perlawanan yang lebih besar apabila pembangunan PT. DESI tetap berlangsung. Sampai dengan penelitian ini diselesaikan, rencana pembangunan pabrik masih dalam proses tarik ulur pembebasan lahan antara masyarakat dan perusahaan.

Kata Kunci : Kelangkaan Air, Konflik Sumber daya, Konflik kelangkaan

## **Abstract**

This study aims to determine the cause of the conflict in the plan to build a B3 waste processing plant in Brondong Sub-district, Lamongan District. This study uses the theory of Environmental Conflict from Thomas Homer-Dixon. Natural resources have limited capacity while humans have a will of unlimited resources. Excessive consumption of natural resources by humans causes increased scarcity of natural resources and implications for the birth of conflict. This research uses a qualitative-descriptive approach with Purposive Sampling data collection method. The result of this research shows that the people of Tlogoretno Village, Brengkok and Sendangharjo Brondong Sub-district of Lamongan Regency have experienced scarcity of water resources naturally since long time. Scarcity does not necessarily lead to violent conflict because of two things. First, the population continues to decline year by year. Secondly, the

---

\* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, email : trisusiloagungwicaksono@gmail.com

existence of the factor of religious values rooted in the pantura society makes water scarcity as a natural phenomenon (given). The presence of plans for the construction of a B3 waste treatment plant by PT. Dowa Ecosystem Indonesia in Tlogoretno Village is considered as a visitor that can pollute the environment and aggravate the condition of scarcity so far. The failure to build good communication between the parties led to social jealousy that triggered the unrest in the community. As a result, conflict and community resistance are the logical consequences that accompany the plant construction plan. The conflict resolution attempt failed. Counter-counter society threatens to fight greater resistance if PT. DESI continues. Until this research is completed, the plant construction plan is still in the process of dragging the land acquisition between the community and the company.

Keywords: Water Scarcity, Resource Conflict, Conflict Of Scarcity

## **Pendahuluan**

Proses transformasi Indonesia menjadi negara industrial menuntut adanya ketersediaan ruang bagi industri-industri baru. Berkembangnya kabupaten/kota besar seperti Surabaya dan Gresik mendorong para pemilik modal untuk melakukan pergeseran kegiatan produksi ke daerah pinggiran ibukota seperti Lamongan. PT. Dowa Ecosystem Indonesia (DESI) merupakan industri yang bergerak dibidang jasa pengolahan limbah B3 berskala multinasional yang berencana melebarkan sayapnya atau berekspansi dengan mendirikan pabrik pengolah limbah B3 yang membutuhkan lahan sekitar 50 hektar di Kecamatan Brondong tepatnya di Desa Tlogoretno. Rencana tersebut ditengarai oleh adanya permintaan terhadap pengolahan limbah B3 khususnya di wilayah Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah darurat limbah B3.

Limbah B3 umumnya dikenal sebagai limbah berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari hasil pengolahan atau kegiatan industri, rumah sakit dan rumah tangga. Sebuah perusahaan di haruskan memiliki sarana prasarana untuk mengolah limbahnya sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya, beberapa industri membuang limbahnya secara sembarangan sebelum dilakukan penetralisiran dan pengolahan yang baik, sehingga zat-zat yang terkandung didalamnya menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem dan lingkungan hidup serta gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar. Hal itu memotivasi para pelaku bisnis di bidang pengolahan limbah B3 seperti PT. Dowa Ecosystem Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 guna menjaga kelestarian lingkungan. PT. DESI telah mendapat ijin penguasaan lahan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan (DPMP) Kabupaten Lamongan yang berlaku selama 3 tahun terhitung mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Namun demikian, rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 oleh PT. DESI mendapat perlawanan dari masyarakat sekitar. Masyarakat Desa Tlogoretno, Brengkok dan Sendangharjo menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Lamongan sebagai manifestasi penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik tersebut. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Lamongan meninjau kembali rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Tlogoretno dengan alasan adanya resiko pencemaran lingkungan yang nantinya ditimbulkan oleh aktifitas pabrik

tersebut seperti kasus yang telah terjadi di daerah lain seperti pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat Lakardowo Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh PT. PRIA<sup>1</sup>.

PT. PRIA terbukti telah melakukan pencemaran terhadap air dan tanah yang digunakan oleh masyarakat Lakardowo sebagai sumber ekonomi dalam sektor Agrikultur. Tidak hanya itu, limbah cair yang dihasilkan oleh PT. PRIA juga mencemari lingkungan disekitar permukiman warga yang menimbulkan gangguan kesehatan pada kulit dan tubuh. Masyarakat juga menuntut pemulihan ekosistem pantura yang telah rusak serta evaluasi perda RTRW tahun 2011-2021 Kabupaten Lamongan yang menetapkan wilayah pantura sebagai kawasan pengembangan sektor industri. Hal itu yang melatarbelakangi masyarakat untuk bersikeras menolak rencana pembangunan pabrik dan melakukan perlawanan sebagaiantisipasi terhadap krisis dan kelangkaan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh aktifitas pengolahan limbah B3 oleh PT. DESI.

Dalam beberapa penelitian yang ditemukan penulis di Universitas Airlangga terkait kelangkaan lingkungan yang disebabkan oleh industri hanya membahas tentang fenomena konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh kelangkaan *NonRenewable Resource* seperti dalam kajian penelitian Ratnasari. Penelitian tersebut hanya membahas tentang degradasi lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekstraksi sumber daya alam batu kapur dan bahan baku semen lainnya dikawasan *Karst* pegunungan kendeng dengan menggunakan perpektif ekonomi politik dan lingkungan sehingga resiko kelangkaan air sebagai *Renewable Resource* yang dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kurang diperhatikan<sup>2</sup>.

Adapun penelitian lain terkait konflik sosial berbasis *Renewable Resource* utamanya oleh pencemaran lingkungan yang dilakukan Nuarna P. dalam penelitian yang berjudul “*Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. PRIA Di Kabupaten Mojokerto*” hanya menguraikan kondisi disintegrasi masyarakat serta kerugian yang bersifat materiil dan ganti rugi yang tidak sesuai sehingga urgensi kelangkaan lingkungan sebagai akar konflik kurang ditekankan<sup>3</sup>.

Kelangkaan sumber daya yang berakibat pada lahirnya konflik kekerasan juga muncul dalam kondisi masyarakat Papua. Martanto, dalam jurnal yang bertajuk “*Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan : Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security*”, menggambarkan betapa masyarakat di timur Indonesia telah mengalami kelangkaan akibat deforestasi dan kegiatan pertambangan

---

<sup>1</sup>[Http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/ratusan-warga-tolak-pembangunan-pabrik-b3-di-lamongan](http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/ratusan-warga-tolak-pembangunan-pabrik-b3-di-lamongan). Diakses pada 15 Januari 2018.

<sup>2</sup> Ratnasari, Evi. 2016. *Konflik Kepentingan Eksplorasi Tambang PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang*. Skripsi, Repository Universitas Airlangga.

<sup>3</sup> Nuarna, Ersya. 2017. “*Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. PRIA Di Kabupaten Mojokerto*”. Skripsi, Repository Universitas Airlangga.

oleh PT. Freeport Indonesia. Fenomena tersebut melatarbelakangi lahirnya konflik kekerasan yang digawangi oleh sekelompok masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dalam tatanan sosial maupun ekonomi dan politik sebagai kerangka pemberhentian kegiatan eksploitasi alam yang berlebihan dan mengakibatkan krisis. Sebuah gerakan perlawanan oleh sekelompok masyarakat papua yang menamai diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuktikan betapa negara sebagai penyelenggara ketertiban tidak dapat menjamin adanya *Environmental Security*. Sehingga, perlawanan sipil bersenjata menjadi konsekuensi logis yang menghendaki adanya kemerdekaan bagi masyarakat Papua yang selama ini mengalami krisis dan kelangkaan sumber daya<sup>4</sup>.

Pada penelitian di Timor Tengah Selatan, Jocom dan grupnya menunjukkan bahwa kondisi kelangkaan air di daerah tersebut tidak terkoneksi dalam melahirkan konflik kekerasan karena dipengaruhi oleh adanya faktor nilai-nilai *local wisdom* yang dipegang teguh oleh masyarakat sehingga memperkuat solidaritas sosial dan menahan terjadinya konflik kekerasan<sup>5</sup>.

Dalam pembahasan yang lain, Martanto juga menyebutkan bahwa dalam rangka pembangunan perdamaian pada kasus-kasus konflik nasional seperti di Aceh, pemerintah dinilai gagal dalam upayanya membangun perdamaian dan menghentikan reproduksi konflik kekerasan pada kasus perlawanan di Aceh yang digawangi oleh kelompok sporadis yang menamai dirinya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Rekonsiliasi tersebut dinilai gagal karena tidak memperhatikan aspek lingkungan di Aceh. Seiring dengan perjalanan demokrasi yang menghendaki adanya kebebasan individu, masyarakat semakin sadar akan haknya atas lingkungan dan sumber daya. Sehingga, negara sebagai penjamin kesejahteraan dituntut untuk lebih teliti dan waspada, utamanya dalam hal jaminan atas kelestarian alam dan sumber daya<sup>6</sup>.

Konflik selalu menarik untuk dikaji sekaligus sukar untuk dipahami terlebih menyangkut relasinya dengan sumber daya alam. Alam memiliki kemampuan yang terbatas sedangkan manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas sehingga relasi antar keduanya selalu berada dalam dinamika konflik. Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mendalam dengan tujuan mengupas tuntas sejarah perjalanan konflik serta relasi kausalitas antara kelangkaan *Renewable Resource* dengan konsekuensi konflik yang terjadi dalam rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 oleh PT. Dowa Ecosystem Indonesia di Desa Tlogoretno kecamatan Brondong kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memilah data yang telah diperoleh dan melakukan analisis konflik menggunakan teori

---

<sup>4</sup> Martanto, Ucu. 2007. "Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua Melalui Pendekatan *Environmental Security*". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2 (11): 153-286.

<sup>5</sup> Jocom H, et al. 2016. "Air dan Konflik: Studi Kasus Kabupaten Timor Tengah Selatan". *Jurnal Ilmu Lingkungan* 14 (1): 51-61.

<sup>6</sup> Martanto, Ucu. 2009. "Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian: Refleksi Kasus Aceh". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 13 (1): 31-47.

*Environmental Conflict* dari Thomas Homer-Dixon. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan observasi lapangan. Penelitian ini berlokasi di kecamatan Brondong dengan menggunakan metode *Purphose Sampling* dimana subjek penelitian telah ditentukan dengan meninjau aktor-aktor yang terlibat dalam kasus konflik dan memiliki relasi keterhubungan satu sama lain. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan akar konflik lingkungan serta menjelaskan kronologi konflik yang terjadi dalam rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 oleh PT. DESI.

### **Kronologi Terjadinya Konflik**

Negara berkembang dituntut untuk melakukan berbagai perombakan diberbagai bidang agar dapat mengejar ketertinggalannya terhadap negara maju. Salah satu ciri negara berkembang ialah masih bergantungnya masyarakat terhadap sektor agraria dan sumber daya alam lainnya. Olehnya, negara berkembang yang menginginkan kesejahteraan harus melakukan perubahan kegiatan produksi konvensional menjadi industri modern atau yang sering disebut dengan istilah pembangunan. Proses transformasi negara agraris menuju negara industrial selalu disertai dengan adanya konflik. Sumber daya alam selalu menjadi hal yang diperebutkan sepanjang sejarah manusia. Konflik merupakan sebuah virus sosial yang kehadirannya dapat bersifat destruktif maupun konstruktif.

Realitas keterbatasan masyarakat di negara berkembang terhadap faktor sumber daya alam merupakan hal yang kontradiktif apabila dibenturkan dengan upaya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan *grand design Wolrd Bank*. Kelestarian alam pada masyarakat tradisional menjadi faktor fundamental dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada masyarakat tradisional di negara berkembang yang memiliki kelimpahan sumber daya alam seperti Indonesia, kelestarian lingkungan hidup merupakan hal penting yang menjadi sumber-sumber penghidupan sehingga kerusakan lingkungan menjadi malapetaka bagi eksistensi masyarakat. Hadirnya industri diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat seperti kemiskinan, ketahanan pangan, dan keamanan disuatu negara utamanya bagi kalangan kelas menengah bawah seperti masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Selama ini masyarakat Tlogoretno dan sekitarnya menggantungkan sumber kehidupan mereka pada sektor pertanian, perkebunan dan kelautan. Akan tetapi kondisi lingkungan mereka mengalami kekeringan sehingga produktifitas ekonominya tidak terlalu menjanjikan. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani yang bercocok tanam menggunakan mekanisme pengairan tadah hujan. Letak wilayahnya yang berdekatan dengan laut menjadikan suplay air yang tersedia terkontaminasi dengan air laut yang asin. Karakteristik tanahnya yang kering menjadi kriteria yang cocok untuk dilakukan kegiatan penimbunan limbah B3. Pasalnya, kegiatan penimbunan limbah B3 membutuhkan wilayah yang kering sebagai antisipasi kebocoran limbah.

Sebagai salah satu anak perusahaan multinasional bermodal besar, PT. DESI tentu memiliki banyak pengalaman dan strategi untuk melancarkan kepentingannya. Tidak lama setelah didapatkannya ijin lokasi PT. DESI yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan (DPMP) Kabupaten Lamongan, PT. DESI berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Brondong untuk melakukan sosialisasi rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 di desa Tlogoretno dengan mengundang para *stake holder* di Kecamatan Brondong. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memaparkan rencana pembangunan pabrik serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat nantinya guna mendapat legitimasi sosial dari masyarakat. Dalam acara tersebut pihak PT. DESI berharap para *stake holder* yang telah dipilih bisa menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Selain itu, pihak PT. DESI melalui pihak Kecamatan Brondong memilih beberapa perwakilan dari masyarakat yang memiliki “pengaruh” untuk menandatangani persetujuan pembangunan pabrik sebagai klaim representasi dari masyarakat Brondong serta bersedia dikirim ke Pemerintah Pusat untuk mempresentasikan kondisi lingkungan dan masyarakat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Beberapa hari setelah proses sosialisasi tersebut dilakukan, PT. DESI langsung melakukan pembebasan lahan dengan menunjuk beberapa makelar untuk melakukan jual beli lahan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan ganti rugi lahan dengan harga dua kali lipat dari sebelumnya. Namun demikian, dalam perjalanannya proses pembebasan lahan mengalami hambatan. Marjuki selaku warga Desa Sendangharjo sekaligus ketua PAC GP Anshor kecamatan Brondong dan beberapa teman-temannya merasa eksistensinya tidak diakui dan tidak dihargai. Pasalnya, mereka tidak diikutsertakan dalam sosialisasi dan tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan pabrik tersebut. Mereka tidak terima wilayahnya dijadikan sarang penimbunan limbah B3.

Selain itu, ketika mereka mengetahui bahwa beberapa *stake holder* yang berada dibelakang pihak PT. DESI adalah mantan lawan politiknya menjadikan emosi mereka semakin meluap. Lebih lanjut, beberapa masyarakat yang merasa dirugikan kemudian bergabung menjadi satu dan menyusun pergerakan untuk menghentikan rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 diwilayah mereka dengan memobilisasi masyarakat luas dan menyadarkan tentang bahaya limbah B3. Masyarakat yang menolak mendapatkan dukungan moral dan finansial yang diperoleh dari balas budi politik beberapa aktor yang memiliki jabatan politik di lingkup lokal dan Desa. Selain itu, masyarakat kontra pabrik mendapat bantuan pengawalan dari elemen mahasiswa UNISDA untuk melawan rencana pembangunan pabrik dengan melakukan aksi unjuk rasa.

Masyarakat kontra pabrik bersepakat untuk menghentikan rencana PT. DESI dan menamakan kelompoknya dengan nama Aliansi Masyarakat Pantura (AMP). Mereka menggelar aksi didepan gedung kantor dewan legislatif dan eksekutif untuk menyampaikan aspirasi penolakannya atas rencana pembangunan PT. DESI. Beberapa

perwakilan dari masyarakat diterima untuk masuk dan mediasi bersama anggota dewan dan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Lamongan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan berkomunikasi bersama pihak perusahaan dan pihak terkait. Setelah adanya aksi unjuk rasa tersebut masyarakat merasa perlawanannya terhadap PT. DESI berhasil sesuai dengan tujuan.

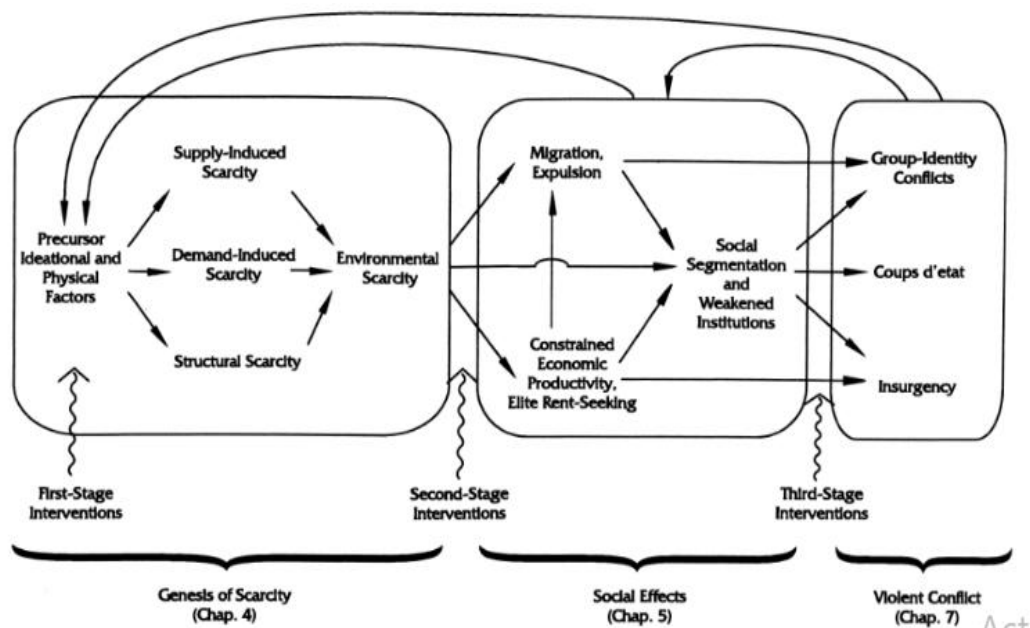
Sejalan dengan itu PT. DESI juga berusaha merajut kembali komunikasi dengan mengundang pihak kontra untuk mengunjungi PT. PPLi untuk menyaksikan secara riil kegiatan pengolahan limbah B3. Upaya tersebut diharapkan dapat meredam konflik dan membubarkan kelompok kontra pabrik. Akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masyarakat kontra yang telah diundang justru semakin bersikeras untuk menolak rencana pembangunan pabrik oleh PT. DESI. Pasalnya, setelah menyaksikan proses pengolahan limbah B3, masyarakat menilai kegiatan pengolahan tersebut justru lebih mengerikan daripada apa yang dibayangkan sebelumnya. Sehingga PT. DESI pun melakukan pembebasan lahan yang masih tersisa secara diam-diam agar tidak diketahui. Tidak lama kemudian, pemerintah Kabupaten Lamongan mengajukan penghapusan kebijakan ijin gangguan/ho dan penghapusan biaya retribusi perijinan kepada para investor yang hendak menanamkan modalnya. Dengan demikian maka konflik tersebut dapat berekskalasi lebih meningkat dari sebelumnya.

### **Kelangkaan Lingkungan : Analisis Konflik**

Menurut Thomas Homer-Dixon, kelangkaan *Renewable Resource* dapat mengakibatkan terjadinya konflik kekerasan ketika terkoneksi dengan beberapa faktor. Kelangkaan lingkungan menurutnya dapat dipengaruhi oleh faktor alam atau kondisi bio/fisik dan faktor manusia. Ketersediaan sumber daya alam yang terkoneksi dengan jumlah populasi manusia yang tinggi dan ketidakadilan akses distribusi sumber daya alam mengakibatkan terjadinya peningkatan kelangkaan yang berdampak pada kondisi sosial seperti penurunan produktivitas ekonomi dan migrasi atau pemindahan dapat secara langsung mengakibatkan segmentasi sosial dan lemahnya lembaga atau institusi yang ada sehingga menyebabkan pemberontakan dan konflik etnik atau identitas yang berujung pada kekerasan<sup>7</sup>. Berikut merupakan bagan relasi kausal konflik kekerasan yang ditengarai oleh kelangkaan lingkungan dan sumber daya:

---

<sup>7</sup> Homer-Dixon, Thomas. 1999. *Environment, Scarcity, and Violence*. Princenton, New Jersey: Princenton University Press.



Sumber Gambar : Homer-Dixon<sup>8</sup>

Masyarakat Desa Tlogoretno, Brengkok dan Sendangharjo selama ini telah mengalami kelangkaan air untuk mengairi sawah dan pertanian serta kelangkaan air tawar dipermukiman warga. Letaknya yang berdekatan dengan laut menjadikan air dipermukiman menjadi asin. Pemerintah desa telah berulang kali melakukan kegiatan pengeboran air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi sumber air bersih bawah tanah memang terbatas dan seringkali tidak ditemukan. Disamping itu masyarakat mengalami ketimpangan akses air.

Permukiman penduduk sebelah barat dan utara desa Brengkok memiliki sumber air yang asin sedangkan disebelah selatan dan timur memiliki air tawar sehingga ketidakadilan akses tersebut membuat warga mengalami ketimpangan sumber daya air. Warga yang mengalami kelangkaan air bersih terpaksa harus menggunakan air tersebut untuk kegiatan mandi, mencuci dan kegiatan lainnya. Sedangkan untuk kebutuhan air minum dan memasak, mereka terpaksa untuk membeli kepada suplier air keliling dengan harga Rp.10.000 per 10 liter air setiap hari. Sedangkan disektor pertanian, masyarakat mengandalkan sistem tadah hujan dimana hanya beberapa warga yang berasal dari kalangan orang kaya saja yang memiliki cadangan air selama musim hujan sedangkan mayoritas warga hanya mengandalkan kondisi cuaca. Disamping itu, jumlah penampungan air tadah hujan juga relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah pertanian dan kebutuhan pengairan masyarakat yang bekerja sebagai petani. Hal itu dikarenakan terbatasnya lahan warga yang tidak terlalu luas dan mahalnya biaya penggalian tadah hujan.

<sup>8</sup> Homer-Dixon, Thomas. 1999. *Environment, Scarcity, and Violence*. Princenton, New Jersey: Princenton University Press.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Lamongan, jumlah populasi desa Tlogoretno, Brengkok dan Sendangharjo terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun terhitung dari tahun 2010 sampai 2015. Kondisi kelangkaan air tersebut semakin parah dari tahun ke tahun sehingga berdampak pada kondisi sosial seperti penurunan produktivitas ekonomi disektor pertanian dan migrasi masyarakat sekitar ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berpindahnya masyarakat menjadi TKI keluar negeri disebabkan oleh minimnya produktifitas ekonomi masyarakat. Masyarakat setempat mayoritas bekerja sebagai petani dan menggantungkan hidupnya pada potensi lingkungan diwilayahnya. Adanya kelangkaan sumber daya air dan ketimpangan akses air yang dialami oeh masyarakat sekitar menginstruksikan mereka untuk berpindah ke tempat lain dan mencari wilayah baru yang dinilai memiliki potensi sumber daya alam dan produktifitas ekonomi yang mumpuni. Pasalnya, kondisi kelangkaan yang menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat utamanya disektor pertanian mendorong masyarakat untuk keluar dari wilayahnya karena potensi sumber-sumber ekonomi yang tidak menjanjikan<sup>9</sup>.

Satu kepala keluarga di Desa Tlogoretno, Brengkok dan Sendangharjo kebanyakan hanya memiliki satu bidang sawah. Satu bidang area persawahan tidak mungkin untuk digarap oleh satu keluarga setiap hari. Musti ada pembagian tugas mengingat petani membutuhkan modal yang sudah pasti besar sedangkan hasil panennya tidak menjanjikan. Fluktuasi nilai komoditas pertanian turut mempengaruhi penurunan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga mereka terpaksa menggunakan pupuk kimia atau anorganik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi solusi alternatif yang benar. Kualitas tanah masyarakat ketiga Desa tersebut terus mengalami kerusakan dan penurunan diakibatkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

Masyarakat terus mengalami ketergantungan terhadap pupuk anorganik karena mereka sudah terlanjur menggantungkan produktivitas pertanian pada pupuk tersebut. Disamping itu kondisi kualitas tanah sudah terlanjur mengalami kerusakan dan kelangkaan menyebabkan penghentian pada penggunaan pupuk anorganik menjadi tidak mungkin. Untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat terpaksa harus menggunakan pupuk sebagai penyubur tanaman. Disamping itu, hasil panen yang tidak pasti mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi ke luar negeri untuk mencari tambahan pendapatan utamanya kebutuhan sehari-hari karena hasil pertanian hanya dapat dinikmati setelah proses penanaman dalam rentang waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan.

Selama ini masyarakat desa Tlogoretno, Brengkok dan Sendangharjo berada pada fase *Social Effect* dimana masyarakat telah mengalami kelangkaan air, ketimpangan akses yang semakin parah dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan

---

<sup>9</sup> <https://lamongankab.bps.go.id>

penurunan produktivitas ekonomi disektor pertanian. Hal itu mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi ke luar negeri menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama ini masyarakat tidak mengalami konflik kekerasan karena populasi di ketiga desa yang mengalami kelangkaan tersebut cukup rendah sehingga masyarakat tidak terlalu tertekan dan memperebutkan sumber daya air dengan kekerasan. Disamping itu, mereka meyakini bahwa kondisi kelangkaan sumber daya yang demikian merupakan takdir atau pemberian dari Tuhan sejak jaman nenek moyangnya. Disisi yang lain, masyarakat pantura terkenal dengan masyarakat yang religius dan memegang norma serta nilai-nilai sosial. Hal itu terbukti dari lokasinya yang berada disepanjang pesisir pulau Jawa yang dahulu menjadi wilayah masuknya persebaran agama Islam khususnya oleh Wali Songo. Disebelah timur berbatasan dengan kecamatan Paciran yang terdapat makam dan petilasan Sunan Drajat dan Sunan Sendang Duwur. Sedangkan disebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tuban yang terdapat makam Sunan Bonang dan Asmoro Kondhi. Dengan demikian masyarakat kecamatan Brondong tentunya memiliki peneguhan terhadap nilai-nilai agama. Menurut Karl Marx, agama merupakan “candu” bagi kaum tertindas yang mengunci kesadaran mereka untuk melakukan pemberontakan.

Kelangkaan sumber daya yang terjadi selama ini cukup membuat masyarakat sengsara akan tetapi mereka tidak memiliki alasan yang kongkrit untuk melakukan pemberontakan dan konflik kekerasan. Hadirnya rencana pembangunan PT. Dowa Ecosystem Indonesia membuat masyarakat semakin terancam. Pasalnya, PT. DESI dianggap sebagai pendatang yang kegiatannya akan memperparah kondisi kelangkaan yang ada sehingga masyarakat mengalami frustrasi dan melakukan pemberontakan untuk melawan dan menggagalkan rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 diwilayahnya. Disamping itu, keterlibatan beberapa pihak dari unsur masyarakat yang berada dibelakang pihak perusahaan salah satunya melibatkan tokoh Muhammadiyah Sendangharjo, menyebabkan Marjuki dan masyarakat kontra pabrik selaku pentolan pemuda Nahdlatul Ulama yang merupakan kelompok mayoritas semakin geram. Kondisi ini disebut Dixon sebagai segmentasi sosial dimana masyarakat mengalami pembelahan identitas yang dapat mengarah pada konflik etnis dan identitas.

Kondisi konflik berbasis sumber daya air di desa Tlogoretno dan sekitarnya saat ini dapat dikatakan memiliki intensitas konflik yang belum terlalu tinggi. Pemerintah kabupaten Lamongan mencabut izin gangguan/ho yang bertujuan mempermudah pihak swasta untuk segera melakukan kegiatan industri. Disisi yang lain, keputusan tersebut dapat mengancam kondisi masyarakat dimana mereka akan kehilangan hak atas lingkungan mereka secara legal. Dengan demikian, konflik dalam rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 dapat berekskalasi menuju kekerasan apabila pemerintah sebagai pihak ketiga tidak segera melakukan resolusi konflik.

## **Kesimpulan**

Rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 oleh PT. Dowa Ecosystem Indonesia telah menyebabkan konflik. Konflik ditengarai oleh kelangkaan air dan lemahnya produktifitas pertanian yang dialami oleh masyarakat Tlogoretno, Brengkok dan Sedangharjo selama ini belum mendapat jalan keluar sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi keluar negeri sebagai TKI untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa kelangkaan lingkungan yang terjadi adalah pemberian atau takdir dari Tuhan. Mereka memegang teguh nilai-nilai agama islam yang telah lama diteguhkan sebagai pedoman hidup. Disamping itu jumlah populasi yang rendah menyebabkan gagalnya konflik kekerasan.

Hadirnya PT. DESI dianggap masyarakat sebagai belenggu yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan memperparah kondisi kelangkaan sumber daya air yang selama ini telah dialami masyarakat. Kondisi kelangkaan tersebut justru dimanfaatkan oleh PT. DESI sebagai kriteria lahan yang cocok untuk digunakan sebagai lokasi penimbunan limbah B3. Masyarakat mengekspresikan perlawanan dan kekecewaannya terhadap negara yang seharusnya dapat mengatasi kondisi kelangkaan tersebut. Ironisnya, pemerintah kabupaten Lamongan justru sedang berminat untuk menarik para investor agar menanamkan modalnya dan mengundang PT. DESI untuk melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 sehingga konflik dan pemberontakan tidak terhindarkan.

Pergerakan masing-masing pihak yang tidak terbuka menyebabkan situasi konflik semakin tidak terbaca dan terselesaikan. Pemerintah kabupaten Lamongan justru bersikap acuh dan mengabaikan kepentingan masyarakat Brondong demi mencapai keuntungan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah dari investasi modal swasta. Konflik berbasis kelangkaan lingkungan ini dapat sewaktu-waktu mengalami ledakan dan eskalasi apabila upaya pembangunan perdamaian tidak segera terealisasi.

## **Daftar Pustaka**

- Homer-Dixon, Thomas. 1999. *Environment, Scarcity, and Violence*. Princenton, New Jersey: Princenton University Press.
- Jocom H, et al. 2016. "Air dan Konflik: Studi Kasus Kabupaten Timor Tengah Selatan". *Jurnal Ilmu Lingkungan* 14 (1): 51-61.
- Martanto, Ucu. 2007. "Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2 (11): 153-286.
- Martanto, Ucu. 2009. "Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian: Refleksi Kasus Aceh". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 13 (1): 31-47.
- Ratnasari, evi. 2016. "Konflik Kepentingan Eksplorasi Tambang PT. Semen Indonesia Di Rembang". Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya.

Nuarna, Ersya P. 2017. "Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. PRIA Mojokerto" Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya.

[Http://lamongankab.bps.com](http://lamongankab.bps.com). Diakses pada 20 Juli 2018

[Http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/ratusan-warga-tolak-pembangunan-pabrik-b3-di-lamongan](http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/ratusan-warga-tolak-pembangunan-pabrik-b3-di-lamongan). Diakses pada 15 Januari 2018.